

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dan analisis hasil penellitian yang telah dilakukan berdasarkan dengan teori yang digunakan, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Infrastruktur Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemulihan pascabencana tsunami pada sektor infrastruktur untuk pemulihan kehidupan masyarakat ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut

a. **Koordinasi**

Dari aspek koordinasi, BNPB, BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR, dan kementerian/lembaga lain telah memiliki koordinasi yang baik dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur. Koordinasi dapat terjalin dengan baik karena adanya pemahaman untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan hidup masyarakat terdampak bencana tsunami.

b. **Pembiayaan**

Identifikasi sumber pendanaan dari Kementerian/Lembaga sebesar Rp76.165.000.000, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp29.550.000.000 dan dunia usaha sebesar Rp2.940.779.017. Optimalisasi pemulihan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang terkendala keterbatasan anggaran sehingga ada pemulihan sektor infrastruktur yang belum dapat direalisasikan.

c. Pemberdayaan masyarakat

Pemulihan pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang sektor infrastruktur sudah mengedepankan koordinasi dan transparansi kepada masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada pengawasan pembangunan saja. Belum ada pemberdayaan masyarakat lebih lanjut seperti peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat terkait dengan sektor infrastruktur, terutama subsektor air bersih, sanitasi, dan drainase.

Dengan demikian, sektor infrastruktur belum secara optimal mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya sarana prasarana dan infrastruktur seperti jalan dan drainase yang ada di kawasan huntap.

5.1.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Perumahan Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemulihan pascabencana tsunami pada sektor perumahan untuk pemulihan kehidupan masyarakat ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi

Dari aspek koordinasi, tidak ada kendala yang ditemukan dalam proses koordinasi pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang. Jika berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988, koordinasi yang dilakukan dalam pemulihan pascabencana sektor perumahan adalah koordinasi instansional, yaitu koordinasi antara beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang.

b. Pembiayaan

Dari aspek anggaran/pembiayaan, masyarakat sendiri tidak dilibatkan dalam hal pendanaan. Jika dilihat dari aspek makro, pembiayaan pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan adanya peningkatan kualitas ini, mendorong masyarakat untuk mampu meningkatkan kemampuan dan motivasinya secara ekonomi. Dari aspek pendanaan, terdapat kendala yang ditemukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yaitu masalah pengadaan lahan terutama untuk pengadaan lahan di Desa Sumberjaya. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang belum bisa dianggarkan oleh Provinsi Banten terkait dengan belum masuk dalam program rencana penganggaran di tahun 2020.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang menggunakan pola Pokmas (kelompok masyarakat). Selain itu banyak masyarakat yang menjadi pekerja (buruh bangunan) dalam proses pengerjaan huntap.

Proses pembangunan Huntap di Kabupaten Pandeglang menggunakan konsep Rumah Instan Struktur Baja (RISBA) dengan pola kelompok masyarakat Pembangunan Huntap selesai dikerjakan dan diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat Huntap pada 23 Desember 2020 tepat 3 tahun setelah bencana Tsunami Selat Sunda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor perumahan pascabencana di Kabupaten Pandeglang pulih dalam waktu 3 tahun setelah terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda. Adanya peningkatan kualitas bangunan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi salah satu nilai tambah dari kegiatan pemulihan pascabencana yang dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa mengenai pemulihan pascabencana pada sektor infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Pandeglang, peneliti dapat memberikan saran terkait permasalahan di atas yaitu :

- a. Pemulihan infrastruktur harus juga menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan infrastruktur menjadi penunjang kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kendala anggaran/pembiayaan yang ada, pemerintah dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan dapat melakukan refocusing anggaran dengan penetapan skala prioritas untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang ada di hantap-hantap.
- b. Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan untuk meningkatkan kualitas sanitasi, drainase, dan air bersih di lingkungan mereka masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga harus memberikan pelatihan dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana. Pelatihan dan sosialisasi harus melibatkan semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pelatihan dan sosialisasi kebencanaan untuk linmas (hansip) yang ada di setiap hantap untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana.